

PROBLEMATIKA MINORITAS MUSLIM DI KANADA DAN PERANCIS¹

Oleh:

Afadlal

Abstract

In this summary, the research on the problem of Moslem minority in Canada and France is to describe how Moslem as minority in western country affected by state and social bias after 9/11 Tragedy. Interaction between Moslem as minority and immigrant community and white people community in western country has long been biased with prejudice and intolerance. This research is to describe how differences between those two communities have brought about an indecisive integration, restrained cultural assimilation. Bringing the gap between two different communities has become the major concern but the result is a long way to come. The main problem of integration Moslem community in western country is strong alienation of Islamic value by white people in western community. For Moslem community in Canada and France, there is also a growing inclination toward divergence in coping with western culture. For western community, the causes are strong ethnocentrism and nativity of white people that come from a feeling of cultural supremacies. Those factors have constrained new social formation in western community.

Pendahuluan

Penelitian berjudul problematika minoritas Muslim di Kanada dan Prancis bermaksud memahami proses integrasi komunitas Muslim ke dalam masyarakat Barat² yang mengklaim bertatanan multikulturalis. Proses integrasi ini menarik dikaji terutama dilihat dari politik Barat memperlakukan komunitas Muslim untuk mendapat gambaran tentang hubungan yang lebih adil antara Islam dan masyarakat Barat. Kasus Kanada dan Prancis pasca-11 September 2001 akan membuktikan persamaan atau perbedaan perlakuan terhadap komunitas Muslim sebagai warga negara, terutama dalam pengertian hubungan kesederajatan dengan komunitas Putih. Peristiwa Serangan 11 September terhadap WTC New York menyebabkan hubungan antara minoritas Muslim dan mayoritas Putih mengalami masa kritis. Suatu

periode yang bisa membuka kesadaran-kesadaran baru dari kedua belah pihak.

Permasalahan integrasi minoritas Muslim ke dalam masyarakat Barat amat kompleks. Di satu pihak, integrasi tersebut akan mendapat peluang lebih besar kalau masyarakat Barat berhasil memperkokoh tatanan multikulturalis, sementara proses perubahannya mengalami banyak rintangan. Sistem ketatanegaraan Barat yang mencerminkan *white dominion* atau sekurang-kurangnya dominasi Putih menjadi kendala tidak ringan. Rintangan juga muncul dari sistem kebangsaan negara-negara Barat yang cenderung bersifat *ethnocentric*. Kedua macam rintangan akan mempersulit proses pencapaian persamaan politik antara komunitas Muslim dan komunitas Putih.³ Akibatnya multikulturalisme hanya akan menjadi wacana tanpa makna atau sekadar menjadi bungkus pengagungan etnis Barat.

¹ Penelitian dengan judul tersebut dilakukan tim yang beranggotakan Afadlal, Dhurorudin Mashad, Hamdan Basyar, Mochtar Pabottingi

² Persoalan integrasi komunitas Muslim ke dalam masyarakat Prancis dibahas dalam Stephanie Giry, "France and its Muslims," *Foreign Affairs*, September/Oktober 2006, hlm. 87–104.

³ Lingkungan Eropa sekarang ini menjadi persemaian bagi perjuangan memperoleh persamaan hak-hak politik, sebagaimana dibahas dalam Heidrien Friese dan Peter Wagner, "The Nascent Political Philosophy of the European Polity," *The Journal of Political Philosophy*, 10: 3 (2002), 342–364.

Di lain pihak, komunitas Muslim mengalami keraguan tentang keniscayaan integrasi mengingat selama ini tersimpan sikap mengasingkan diri dalam kehidupan sosial di negara mayoritas Putih dengan alasan perbedaan keimanan. Apalagi, masyarakat Barat cenderung mengasingkan komunitas Muslim dengan alasan perbedaan-perbedaan biologis, ideologis, dan kultural, selain warisan sejarah permusuhan antara Barat dan Islam. Keraguan terhadap keniscayaan berintegrasi tidak hanya akan semakin mengucilkan komunitas Muslim, tetapi lebih buruk lagi, akan menyudutkan posisinya sehingga mudah menjadi kambing hitam bagi kegiatan-kegiatan melawan negara dan mengganggu masyarakat. Komunitas Muslim sering dituding oleh pihak Barat sebagai sumber gerakan teroris.

Tema problematika minoritas Muslim menggambarkan *political uncertainties* bagi integrasi komunitas Muslim, suatu kelompok yang oleh masyarakat Barat masih dianggap asing sampai sekarang. Proses integrasi baru mulai terutama dalam bentuk upaya saling pengertian oleh kelompok-kelompok kecil dari kedua belah pihak. Interaksi antara mayoritas dan minoritas berjalan alamiah dan kedua belah pihak tidak bisa mengalami pemisahan selamanya, kendati kegiatannya belum begitu jelas. Jembatan integrasi mengambil bentuk pemahaman generasi ketiga migran⁴ bahwa peradaban Barat telah menjadi bagian hidup tidak terpisahkan. Sementara itu, sebagian kecil mayoritas Putih menyadari bahwa “orang-orang asing” itu tidak bisa diusir dan mereka bahkan telah menyumbang banyak darmabakti kepada negara.

Pengalaman komunitas Muslim berinteraksi dengan komunitas Putih di banyak negara Barat tidak selalu seragam dan dalam beberapa hal mungkin berbeda sama sekali. Penelitian ini seperti mendapat sugesti judulnya. Uraian kasus Kanada dan Prancis menandai

makna judul sesungguhnya, yaitu suatu pergaulan sosial yang sulit menemukan pola. Interaksi memasuki jalan panjang, gelap tanpa arah, karena dihambat oleh logika-logika politik semu. Misalnya, jaminan persamaan politik tidak sungguh-sungguh berhasil menghilangkan subordinasi komunitas Muslim oleh komunitas Putih. Pengakuan hak-hak sipil minoritas apa pun selalu mengalami pelemahan dengan politik kooptasi melalui kebijakan afirmatif. Bahkan lebih buruk lagi, globalisasi telah menjadi jubah kepolisian mengawasi minoritas.

Negara sebagai Variabel Bebas

Kasus integrasi minoritas Muslim ke dalam masyarakat Barat di Kanada dan Prancis telah mengungkap peran sentral negara dalam penyelenggaraan dominasi mayoritas Putih. Perdebatan politik dan wacana umum di kedua negara memperlihatkan sejumlah bukti kuat peran tersebut. Pemerintahan oleh negara amat konsisten mengambil kebijakan nativistik sambil berusaha menjamin hak-hak kewarganegaraan tanpa peduli ras, etnisitas, darah, dan agama. Klaim perlindungan kewarganegaraan tampak bervariasi dari satu negara ke negara lain tetapi jelas tidak memberikan perlakuan adil terhadap orang-orang Muslim. Elite negara memiliki kesadaran sejarah memelihara kebangsaan pra-modern dengan tidak menutup peluang imigrasi orang-orang Muslim, termasuk hak menjadi warga negara.

Penelitian ini menemukan kenyataan politik bahwa orientasi kenegaraan (*civic*) dan bukan kemasyarakatan (*civil*) yang mewarnai seluruh kekuasaan mengatur kewarganegaraan dan mengakomodasi kepentingan komunitas Muslim. Secara alamiah, kekuasaan di Prancis bersifat administratif, sedangkan di Kanada, dalam praktik, kekuasaan bersifat pragmatis sejauh mendukung agenda negara. Penyelenggaraan kekuasaan mengatur kewarganegaraan dalam pemerintahan Barat memang menjadi monopoli elite-elite politik yang mengibarkan bendera patriotisme. Dalam konteks kekuasaan, masalah integrasi komunitas Muslim selalu mempertanyakan perasaan patriotik orang-orang bukan *native*. Oleh karena itu, pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan sosial orang-orang bukan Putih lebih mencerminkan penyelenggaraan kekuasaan di bawah elite negara daripada elite politik.

⁴ Generasi pertama adalah migran yang datang dari negara asal dan masih mempertahankan budaya daerah dan identitas nasional asli. Generasi kedua adalah anak-anak migran yang lahir di negara baru dan masih memiliki adat istiadat leluhur. Sebutan generasi ketiga merujuk anak-anak generasi kedua yang sudah mengadopsi budaya nasional dan peradaban Barat di negara baru. Sebagian dari mereka justru memilih melestarikan budaya dan adat istiadat leluhur, misalnya Islam fundamentalis. Sebagian yang lain mengalami kebingungan, antara budaya lama dan baru.

Esensinya jelas, pemerintahan Barat menguasai kehidupan sosial orang-orang Muslim. Mereka seolah menjadi subjek dari suatu pemerintahan kolonial.

Pemerintahan Republiken di Perancis mewarisi kekuasaan monarki. Secara fisik bangun kerajaan telah roboh, tetapi karena pemerintahan yang menggantikan tidak berhasil dengan “sempurna” mengakomodasi elemen kemasyarakatan *enlightenment*, tradisi monarki tetap masih menjiwai perilaku pemerintah. Tradisi ini mengambil bentuk sistem despotik dengan kekuasaan seorang tokoh masih sangat besar, kendati institusi perwakilan ikut menjadi bagian dari suatu pemerintahan. Selain itu, tradisi monarki juga memelihara bentuk sistem birokrasi dan sistem mengejar keuntungan sendiri. Sentralisasi kekuasaan negara otoritarian menjadi wujud nyata pemerintahan republik, yang artinya statisme tidak mengandung elemen liberal.⁵

Pemerintahan Prancis juga mewarisi semangat politik revolusioner, yaitu kewarganegaraan moderen. Praktek persamaan politik selalu menjadi aspirasi seluruh warga bangsa Putih. Tetapi, tidak mudah mewujudkan aspirasi tersebut. Elite-elite negara meliputi para bangsawan dan birokrasi kerajaan mengendalikan penuh kegiatan pemerintahan. Elite negara yang membangun kesadaran kebangsaan dan seluruh tahapan binatang politik.⁶ Revolusi Prancis 1789 ternyata tidak berhasil membuka politik negara untuk sistem demokrasi. Misalnya, baru pada masa pembentukan Republik III kelas borjuasi bisa mengambil keuntungan politik lebih besar, sedangkan partisipasi politik buruh baru mendapat peluang pada masa sesudahnya, terutama setelah Perang Dunia II.

Perilaku negara Kanada tidak berbeda sama sekali dari perilaku negara Prancis. Negara Kanada memegang peran sentral dalam memelihara kelangsungan hidup negara dwi-bangsa Prancis dan Inggris yang berarti dominasi Putih. Peran itu dimainkan oleh perdana menteri yang bisa bertindak seolah sebagai seorang

gubernur jenderal. Peran Ratu Inggris tidak tampak dan politik Britania Raya menjadi model pemerintahan Kanada. Perdana menteri bisa mengangkat pejabat-pejabat kehakiman dan sangat menentukan dalam pemilihan senator. Meskipun mengikuti sistem parlementer, perdana menteri memiliki kedudukan kuat bukan karena mendapat dukungan mayoritas suara di lembaga perwakilan tetapi karena kapasitas jabatannya untuk melakukan manuver politik. Perdana menteri bisa melakukan negosiasi dengan para tokoh separatist Quebec untuk mencegah disintegrasi negara dan memupuk identitas nasional.

Sentralisasi kekuasaan negara bermuara pada kekuasaan perdana menteri yang dominan dalam pemerintahan, sedangkan parlemen kurang bebas. Tidak seperti uraian tentang teori pemerintahan federal, sistem federasi Kanada cenderung mengalami sentralisasi kekuasaan melalui sistem patronase dalam kantor perdana menteri. Struktur ini perlu untuk menjalankan pemerintahan federal yang menggabungkan sistem federasi teritori dengan federasi etnis kebangsaan. Oleh karena itu, dapat dipahami, pemerintah federal selalu dikuasi oleh partai liberal dengan perdana menteri orang Quebec.

Pemerintahan dikuasai oleh elite negara yang merupakan produk masa kolonial. Pemerintah koloni Inggris berusaha membentuk negara Inggris seberang lautan di Kanada dengan mendatangkan orang-orang Inggris dan Irlandia sebanyak-banyaknya. Selain itu, sejak awal pemerintah koloni Inggris memberi peluang orang-orang Prancis mengambil bagian dalam pemerintahan dengan kedudukan sederajat. Untuk mengimbangi jumlah penduduk dari kebangsaan Prancis, Inggris mendatangkan orang-orang Eropa lain beragama Protestan. Usaha ini jelas menjadi bukti bagi peran sentral negara dalam membentuk identitas nasional di kemudian hari. Bukti ini amat kuat karena pemerintah kolonial lebih mengutamakan pembentukan negara daripada pembentukan masyarakat. Dalam konteks pembentukan negara Kanada, pemerintah kolonial Inggris telah menjalankan politik konsosiasional. Dalam hal ini, politik negara dimainkan oleh elite representasi bangsa Prancis dan bangsa Inggris. Politik negara bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan *civil society*, tidak seperti di Prancis. Di Kanada kebebasan individu lebih

⁵ Jack Hayward, “Testing the Limits of French Statism,” *European Journal of Political Theory*, Volume 4, No. 3, 2005, 301.

⁶ Robert von Fredeburg, “Review of the Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660—1789,” *European Journal of Political Theory*, Volume 4, No.3, Juli 2005, hlm. 309.

besar daripada yang terjadi di Prancis. Dalam hal ini, termasuk kebebasan menjalankan ibadah.

Di Kanada masyarakat memiliki dinamika tinggi yang merupakan watak dasar penganut agama Protestan. Masyarakat libertarian memang menjadi ciri khusus masyarakat Protestan.⁷ Individu beragama Protestan memiliki keuletan untuk mencapai prestasi dengan pertaruhan kemampuan diri. Berbeda dari masyarakat Protestan, masyarakat Katolik memiliki ciri komunitarian dengan ciri kolektifitas dan solidaritas masyarakat sangat menonjol. Di Kanada kedua jenis masyarakat ini membaur sehingga kedua corak hidup bersifat saling melengkapi di bawah semangat libertarian yang mencolok.

Elite Negara Berideologi Sekuler

Ideologi sekuler mempengaruhi tindakan elite negara mengawasi masyarakat. Di Kanada dan Prancis, elite negara menjalankan pemerintahan dengan menjunjung undang-undang negara. Kebebasan beribadah mendapat perlindungan, tetapi kelompok kepentingan agama tidak boleh mengurus kepentingan umum. Elite negara Kanada dan Prancis mengakui kenyataan bahwa masyarakat Barat beridentitas Kristen. Identitas ini telah lama menjadi moralitas peradaban Barat. Oleh karena itu, elite negara Kanada dan Prancis mengawasi masyarakat agar agama tetap menjadi bagian penting budaya nasional. Agama Kristen menjadi identitas orang-orang Putih. Sebaliknya, agama Islam dipandang bukan agama orang-orang Putih.

Elite negara Prancis tidak hanya mengawasi masyarakat tetapi juga mengontrolnya dengan meminggirkan kekuatan Agama Katolik. Negara Prancis adalah negara Laicite atau negara sekuler yang mengontrol kekuatan agama. Agama Katolik tidak boleh menjadi basis bagi kekuatan masyarakat. Elite negara merasa mengemban tugas sejarah meminggirkan kekuatan agama Katolik yang memiliki aset ekonomi besar ketika permusuhan dengan kekuatan agama mulai empat ratus tahun lalu. Agar kekuatan agama tidak menjadi kekuatan politik, identitas

Katolik digabungkan dengan identitas *enlightenment* menjadi identitas universal.

Ideologi Laicite telah menempatkan agama Kristen sejajar dengan agama-agama lain. Sejauh kekuatan agama bisa dikendalikan elite negara merasa bisa memegang dominasi kekuasaan negara. Pengendalian dan pemeliharaan identitas Kristen dilakukan dengan menolak pluralisme budaya tumbuh secara jenuin. Kristen tetap menjadi identitas tunggal. Prancis tidak boleh mengambil identitas agama Islam dan agama lain. Tampaknya, agama Yahudi bisa menjadi identitas Prancis, karena dipeluk oleh banyak orang Barat yang telah menyumbang nilai-nilai Barat. Itulah sebabnya, mengapa ajaran Kristen dan Yahudi dijadikan pelajaran di sekolah negeri, sesuatu yang berbeda dari agama Islam.

Berbeda dari Prancis, elite negara Kanada hanya menjamin kebebasan menjalankan agama di masyarakat. Elite negara tidak mengontrol masyarakat karena sistem klerikal telah menempatkan kerajaan Inggris sebagai pelindung. Tugas terpentingnya adalah melestarikan identitas Kristen sebagai identitas nasional dengan melakukan sosialisasi nilai-nilainya melalui pelajaran keagamaan di sekolah negeri. Sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan bermoral keagamaan telah membuat identitas Kristen menjadi dominan di masyarakat.

Ideologi sekuler telah memotivasi elite negara untuk mempertahankan supremasi peradaban Barat, universalisme, dan nilai-nilai Kristen. Penelitian problematika minoritas Muslim di Kanada dan Prancis seharusnya bisa menggambarkan bagaimana elite negara menggunakan ideologi sekuler sebagai inspirasi dan aspirasi bagi semua tindakan menyangkut integrasi komunitas Muslim ke dalam masyarakat Barat. Penelitian ini tidak mudah karena harus mengamati perilaku aktor politik dalam pemerintahan dari masa ke masa dan menyangkut sejumlah isu. Bagian ringkasan hasil penelitian berikut hanya akan menggambarkan bagaimana hubungan komunitas Muslim dan komunitas Putih dalam tataran negara dan dalam tataran masyarakat. Negara bersama ideologi sekuler, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, mengambil peran penting dalam seluruh penjelasan mengenai interaksi antarkomunitas yang tidak mudah tumbuh dan kalau sudah tumbuh mudah mati.

⁷ Phillip E. Hammond, "The Curious Path of Conservatism," *The Annals*, Juli 1985, Volume 480, hlm. 61.

Eksklusi terhadap Komunitas Muslim

Penelitian ini mencatat struktur kekuasaan negara di Kanada dan Prancis sama-sama hanya mengambil basis dukungan dari mayoritas Putih. Manifestasinya adalah bahwa konstitusi dan institusi hanya memberi peluang orang-orang Putih mengambil bagian dalam pemerintahan. Dalam kaitan ini, pemerintah Kanada dan Prancis menerima mandat dari mayoritas Putih dan menerima tuntutan maupun dukungan dari mayoritas itu pula. Oleh karena itu, secara alamiah kedua negara itu merupakan rumah bangsa Putih.

Umumnya, pemerintahan juga mengakui orang-orang bukan Putih sebagai bangsa negara Barat bersangkutan. Bangsa Kanada bukan hanya orang Putih, tetapi juga orang Hitam. Begitu juga untuk Prancis. Tetapi kedua negara itu tidak mengikuti tradisi Amerika Serikat yang menyebut orang Hitam segaris dengan orang Putih, dituliskan dalam *Afro-American*. Tidak diketahui secara pasti sebab di balik eksklusivitas orang-orang Putih di Kanada dan Prancis. Barangkali kedua negara itu memang masih sangat membedakan kedudukan kewarganegaraan orang-orang bukan Putih. Yang pasti adalah bahwa pemerintah Prancis tampak membangun struktur kekerasan terhadap orang-orang bukan Putih. Kanada mungkin tidak sekeras Prancis dan memberikan kemudahan bagi imigrasi orang-orang Muslim, tentu saja tetap dengan penuh kehati-hatian.

Pemerintahan Barat cenderung memiliki ilusi bahwa Islam bertentangan dengan peradaban Barat. Akibatnya, semua undang-undang dianggap mencerminkan peradaban Barat dan semua penonjolan simbol Islam dalam tataran negara dianggap melanggar peraturan atau bahkan konstitusi. Di Prancis pemakaian jilbab oleh perempuan muslimah di gedung pemerintah merupakan tindak irisinuasi terhadap peradaban Barat. Begitu pula di Kanada, para pejabat cenderung menuduh para pemakai jilbab melawan kebebasan. Mereka tampak masih ragu, apakah hal itu betul-betul melanggar hukum. Apalagi ada kemungkinan pemakaian jilbab merupakan bagian dari keyakinan bukan sekadar identitas keagamaan.

Para pejabat tanpa ragu selalu mencari bukti tentang pelanggaran terhadap peradaban Barat. Kedua kasus penelitian menampilkan sejumlah kenyataan buruk tersebut. Misalnya,

penolakan komunitas Muslim terhadap kebebasan pornografi dan pornoaksi, anti poligami dan kesetaraan gender. Mereka juga menyebut pemisahan fasilitas umum melanggar kepentingan publik. Di Prancis kode sipil (*civil code*) dianggap secara langsung bertentangan dengan Islam.

Kenyataan buruk lain adalah kecurigaan terhadap Islam. Misalnya, politik Islam dianggap menjegal demokrasi dan menjadi sumber kekerasan. Pemerintah Prancis saat ini memenjarakan banyak orang Islam beraliran keras. Kecurigaan juga memotivasi pemerintah melakukan diskriminasi, misalnya dalam pengurusan dokumen pribadi dan identitas diri. Bahkan, ada kasus paspor warga negara bukan Putih dicampakkan, semata untuk menunjukkan diskriminasi.

Tidak semua kecurigaan membuahkan tindakan koersi. Kecurigaan bisa menghasilkan tindakan sebaliknya: persuasi. Pemerintah Prancis melakukan persuasi terhadap komunitas Muslim melalui pembentukan Dewan Peribadatan Masjid setingkat lembaga peribadatan Yahudi, selain lembaga kemuftian seperti lembaga kependetaan. Maksudnya adalah jelas, yaitu membujuk komunitas Muslim agar sukarela menyesuaikan diri dengan universalisme Prancis. Tindakan persuasi mungkin juga bisa membuka sikap elite pemerintahan untuk memahami Islam. Apalagi, kurang lebih 200 orang Muslim mengambil bagian dalam pemerintahan kota praja.

Tataran Masyarakat

Interaksi antara komunitas Muslim dan komunitas Putih masih diwarnai perasaan saling berprasangka buruk. Penelitian secara umum mencatat bahwa perbedaan-perbedaan di antara kedua pihak telah membuat proses integrasi sosial tidak menentu, tidak ada asimilasi kultur dan tidak ada formasi sosial Barat baru. Sikap *ethnocentric* kalangan mayoritas masih kuat. Begitu pula, perasaan nativistik kalangan mayoritas Putih masih tinggi. Selain itu, masyarakat Putih merasa memiliki supremasi budaya, di mana budaya minoritas tidak mendapat pengakuan, kalau perlu mengalami pemusnahan.

Di Kanada minoritas Muslim mengalami segregasi sosial dalam bentuk pemukiman *ghetto-ghetto* masyarakat pinggiran yang beragam. Di

Prancis komunitas Muslim banyak bermukim berkelompok di wilayah pinggir kota. Kehidupan komunitas Muslim di kedua negara ini belum memadai, sebagian besar menjadi buruh. Selain itu, komunitas Muslim masih memelihara hubungan-hubungan parokial. Komunitas Muslim boleh dikatakan merupakan kelompok marginal, baik karena mengalami diskriminasi maupun karena perilaku keterasingan diri (*enclave*).

Mayoritas Putih sengaja memisahkan diri dari minoritas Muslim karena kelompok yang disebut terakhir dianggap terbelakang dan perlu mendapat pembinaan. Minoritas Muslim juga dianggap memiliki stereotipe buruk seperti pemalas dan pembuat onar. Mayoritas Putih memperlakukan minoritas Muslim sebagai komunitas asing meskipun sudah menjadi warga negara cukup lama. Minoritas Muslim menjadi sasaran pelecehan termasuk penghinaan terhadap agamanya.

Sementara itu, komunitas Muslim menganggap kelompok mayoritas melakukan tindakan subordinasi terhadapnya. Komunitas Muslim merasa mendapat perlakuan tidak adil, seperti dipojokkan sebagai kelompok teroris. Dalam dunia kerja, orang-orang Muslim sering mendapat kesulitan melakukan ibadah di tengah-tengah kesibukan bekerja. Bahkan, tidak jarang, mereka mendapat upah kerja yang tidak mengikuti sistem penggajian yang adil.

Sebagian kelompok terpelajar Muslim memikirkan pembentukan jembatan interaksi antara komunitas Muslim dan komunitas Putih. Kelompok ini menyadari bahwa komunitas Muslim sudah menjadi bagian dari peradaban Barat. Di Prancis dan Kanada kelompok-kelompok ini mengembangkan pemikiran Islam Liberal yang melihat kemungkinan konvergensi antara Barat dan Islam. Mereka melihat perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk tidak membangun hubungan harmonis. Mereka mengembangkan etika Ibrahim, bapak dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Etika Ibrahim merujuk pada kesalehan sosial, termasuk mencintai orang miskin. Selain itu, mereka berpandangan bahwa sejarah permusuhan Islam dan Barat bersumber pada kepicikan dan salah pengertian. Mereka menamakan kelompok mereka sebagai kelompok Muslim Barat. Hal ini berarti bahwa kelompok Islam telah mengadopsi nilai-nilai Barat. Fikih Hidayah Idaroh mencoba membangun suatu refleksi tentang peranan

minoritas Muslim di tengah mayoritas Barat. Fikih ini dikembangkan oleh kelompok Islam liberal yang mengagumi budaya Barat.

Sebagian yang lain tumbuh sebagai kelompok radikal karena merasa mendapat perlakuan tidak adil dari kelompok mayoritas. Kelompok ini merasa mendapat peluang berkiprah seiring dengan pertumbuhan gerakan pembela hak-hak sosial. Sebagian dari mereka membentuk kelompok bisnis melawan bisnis Barat seperti di Prancis Zam-Zam Cola atau Muslim Burger. Pembentukan kelompok dengan predikat islami ini dirasakan oleh kelompok mayoritas sebagai ancaman, bahkan dituduh mau melakukan islamisasi Barat.

Kalangan komunitas Muslim sendiri tidak memiliki persatuan yang kuat. Kelompok-kelompok Islam tumbuh dengan membawa aliran masing-masing. Selain itu, mereka juga terpecah ke dalam kelompok berorientasi etnis. Di antara mereka sering pula terjadi pertentangan, tidak hanya menyangkut ibadah tetapi juga kepentingan kelompok. Usaha untuk mempertemukan mereka sudah dirintis oleh para tokoh masing-masing tetapi selalu mengalami kesulitan.

Hubungan antara komunitas Muslim dan komunitas Putih di satu pihak dan di pihak lain hubungan internal komunitas Muslim menggambarkan kompleksitas permasalahan yang terjadi ketika suatu upaya pembentukan masyarakat Barat yang baru menjadi tekad bersama di antara mereka. Penelitian ini telah mencoba memahami hubungan-hubungan Islam dan Barat di negara – negara Barat dengan penuh empati dan simpati terhadap pembelaan hak-hak tradisional mayoritas Putih.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2000. "France and The Arabs- Odd Relations," *The Economist*, 17 Juni 2000, hlm. 60.
- Anonim. 2000. "How Multilingual is France?" *The Economist*, 29 April 2000.
- Anonim. 2002. "The France's shame." *The Economist* 27 April 2002.
- Anonim. 2004. "Muslims in Canada", dalam <http://www.masnet.org>, 6 Agustus 2006.

- Bencheikh, Soheib. 2004. "Tafsir Multikultural: Jihad Melawan Kejumudatan Teks", hasil wawancara, Pertengahan Maret 2004. <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=538>.
- Anonim. 2004. "Prancis Akan Sahkan RUU Anti Kerudung", *Era Muslim*, diakses pada 11 Februari 2007.
- Anonim. 2005. "Jalan Berliku ke Arah Integrasi Prancis", *Kompas*, 14 Februari 2005.
- Buchanan, Allen dan Margaret Moore (Eds.). 2003. *States, Nations and Borders*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Friese, Heidrien, dan Peter Wagner. 2002. "The Nascent Political Philosophy of the European Polity." *The Journal of Political Philosophy*, Vol. 10, No. 3, hal. 342-364.
- Giry, Stephanie. 2006. "France and its Muslims." *Foreign Affairs*, September/Oktobre 2006, hal. 87—104.
- Hammond, Phillip E. 1985. "The Curious Path of Conservatism." *The Annals*, Juli 1985, Volume 480, hlm. 52—78.
- Hayward, Jack. 2005. "Testing the Limits of French Statism." *European Journal of Political Theory*, Vol. 4, No. 3, 2005, hal. 301—325.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Ratna, Myrna. 2005. "Jalan Berliku Ke Arah Integrasi Prancis". *Kompas*, 14 Februari 2005
- Roeder, Philip. 1999. "Peoples and States after 1989: The Political Costs of Incomplete National Revolutions." *Slavic Review*, 58, 1999.
- Rose, Alexander. 2001. "Islamist Purging." Washington correspondent, National Post, 12 December, 2001.
- Rustow, Dankwart A. 1970. "Transition to Democracy: Toward A Dynamic Model." *Comparative Politics*, 2, 1970.
- Taheri, Amir. 2003. "Chirac and The Muslims", *National Review Online*, 19 Desember 2003.
- Von Fredeburg, Robert. 2005. "Review of the Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660-1789." *European Journal of Political Theory*, Vol. 4, No.3, Juli 2005, hlm. 305—327.